



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

DPRD KABUPATEN SIDOARJO



POTENSI BESAR: UMKM di Sidoarjo masih berada di level mikro dengan skala usaha terbatas. Masalah akses pasar, permodalan, serta pengembangan usaha yang belum merata mengakibatkan pertumbuhan sektor ini cenderung lambat.

FOTO-FOTO DPRD KABUPATEN SIDOARJO UNTUK JAWA POS

DPRD Sidoarjo Dorong UMKM Naik Kelas

Untuk Perkuat Ekonomi Daerah

DPRD Kabupaten Sidoarjo terus mendorong penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan di tengah tantangan ekonomi global. Dengan jumlah pelaku usaha yang mencapai 200 ribu orang, potensi besar di "Kota Delta" ini dinilai perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas dan daya saing.

Saat ini, sebagian besar UMKM di Sidoarjo masih berada di level mikro dengan skala usaha terbatas. Masalah akses pasar, permodalan, serta pengembangan usaha yang belum merata mengakibatkan pertumbuhan sektor ini cenderung lambat.

Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo Abdillah Nasih menyoroti pentingnya keberlanjutan usaha. Dia menilai, kapasitas produksi dan perluasan pasar menjadi tantangan utama yang harus segera dicarikan solusinya melalui kebijakan strategis.

"Jumlah UMKM kita sangat besar, tetapi belum semuanya bisa 'naik kelas'. Fokus kita saat ini adalah bagaimana mendorong mereka agar tidak sekadar

bertahan, tetapi juga berkembang secara signifikan," ujar Nasih, Senin (27/4).

Dia menambahkan bahwa pola pemberdayaan UMKM kini harus berorientasi pada dampak jangka panjang. Program pemerintah daerah diminta tidak lagi sebatas pemberian bantuan stimulan, melainkan harus lebih terukur dan tepat sasaran. "Program harus jelas hasilnya. Jangan sampai bantuan habis begitu saja tanpa ada perubahan nyata pada kapasitas usaha mereka," tegasnya.

Di sisi lain, struktur ekonomi Sidoarjo yang masih didominasi industri besar menciptakan ruang persaingan yang ketat bagi pelaku usaha kecil. Sekretaris Komisi B DPRD Kabupaten Sidoarjo Sulamul Hadi Nurman menilai kelemahan utama UMKM terletak pada sektor hilir atau pemasaran.



BERDAYA SAING: Car free day menjadi ajang bagi para pelaku UMKM untuk menawarkan produk unggulan.

"Banyak UMKM yang sangat kuat dalam produksi, namun lemah di akses pasar. Inilah yang menyebabkan stagnasi," ungkap pria yang akrab disapa Gus Wawan tersebut.

Gus Wawan menekankan pentingnya adaptasi teknologi digital. Menurutnya, pendampingan yang diberikan harus berkelanjutan dan aplikatif agar pelaku UMKM mampu masuk ke dalam ekosistem pemasaran modern. "Pelatihan saja tidak cukup. Mereka harus benar-benar didorong untuk mengimplementasikan sistem pemasaran digital guna menjangkau pasar yang lebih luas," lanjutnya.

Senada dengan hal tersebut, anggota Komisi B DPRD Kabupaten Sidoarjo Kusumo Adi Nugroho menyoroti hambatan klasik yang masih membayangi, yakni permodalan dan perizinan. Dia mendesak adanya kebijakan yang lebih berpihak, mulai kemudahan akses pembiayaan formal hingga simplifikasi administrasi usaha.

"Modal, izin, dan akses pasar adalah tiga hambatan utama. Jika ini dipermudah, UMKM kita akan memiliki daya saing yang berkelanjutan dan mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah yang tangguh," pungkas Kusumo. (ful/xav)

Jawa Pos

Rekam E-KTP, Dispendukcapil Jemput Bola ke Rumah ODGJ

SIDOARJO - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Sidoarjo memastikan seluruh masyarakat memperoleh layanan administrasi. Mereka menerapkan sistem jemput bola untuk melakukan perekaman KTP elektronik (e-KTP) dengan mendatangi rumah orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)

Kepala Dispendukcapil Sidoarjo Reddy Kusuma mengatakan bahwa pelaksanaan perekaman mengacu laporan. Dalam praktiknya, proses perekaman tidak selalu berjalan cepat. Petugas harus menyesuaikan kondisi ODGJ. Terutama saat keadaannya tidak stabil.

"Terkadang petugas harus menunggu satu sampai dua jam agar perekaman bisa di-



Kalau tidak memungkinkan biasanya kami jadwalkan ulang," Reddy Kusuma Kepala Dispendukcapil Sidoarjo

lakukan," kata Reddy. Kondisi at satu kunjungan tidak begitu, lanjut Reddy, membu- lalu langsung menghasilkan

kan perekaman. Bahkan dalam beberapa kasus, petugas harus datang dua hingga tiga kali hingga proses berhasil dilakukan. "Kalau tidak memungkinkan biasanya kami jadwalkan ulang," ujarnya. Dispendukcapil mencatat

perekaman terhadap 268 ODGJ sepanjang 2024 dan 220 di 2025. Sementara itu, hingga April 2026 tercatat 76 ODGJ telah direkam. Dispendukcapil menargetkan angka perekaman terus bertambah. (ful/hen)

DPRD KABUPATEN SIDOARJO



POTENSI BESAR: UMKM di Sidoarjo masih berada di level mikro dengan skala usaha terbatas. Masalah akses pasar, permodalan, serta pengembangan usaha yang belum merata mengakibatkan pertumbuhan sektor ini cenderung lambat.

FOTO FOTO DPRD KABUPATEN SIDOARJO UNTUK JAWA POS

ATEN SIDOARJO

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

KOMINFO KABUPATEN SIDOARJO

KONSISTENSI:
Bupati Sidoarjo
Subandi
menerima
penghargaan
sebagai
kabupaten
dengan kinerja
tertinggi se-
Indonesia.



KOMINFO KABUPATEN SIDOARJO UNTUK JAWA POS

Raih Predikat Kinerja Kabupaten Tertinggi Se-Indonesia

SIDOARJO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo kembali menorehkan prestasi gemilang di kancah nasional. Berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD), Sidoarjo dinobatkan sebagai kabupaten dengan kinerja tertinggi se-Indonesia dengan perolehan skor 3,6389. Capaian itu menjadi bukti nyata konsistensi jajaran Pemkab Sidoarjo dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat Kota Delta.

Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan bahwa penghargaan tersebut merupakan buah dari kerja kolektif seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Menurutnya, capaian membang-

gakan itu tidak lepas dari sinergi serta kedisiplinan tinggi dalam menjalankan setiap program kerja. Subandi menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh jajaran OPD atas kinerja luar biasa yang telah ditunjukkan selama ini.

Kendati demikian, Subandi mengingatkan agar seluruh jajaran tidak cepat berpuas diri. Dia menegaskan pentingnya menjaga kepercayaan publik melalui layanan yang cepat, mudah, dan responsif terhadap segala kebutuhan warga. Menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan bagi OPD untuk menurunkan standar kualitas pelayanan. (ful/xav)

Jawa Pos



ASET PEMKAB: Politeknik Kelautan dan Perikanan di Sedati yang diusulkan jadi sekolah rakyat memiliki luas 10,2 hektare.

Politeknik Kelautan dan Perikanan Diusulkan Jadi SR

Setelah Kemensos Tolak Dua Lokasi

SIDOARJO - Pemkab Sidoarjo resmi mengusulkan Politeknik Kelautan dan Perikanan (PKP) di Sedati jadi sekolah rakyat (SR). Usulan itu disampaikan setelah dua lokasi di Sukodono dan Tulangan ditolak Kemensos.

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinsos Sidoarjo M. Wildan mengatakan bahwa Pemkab sudah mengirim surat ke pemerintah pusat Senin (27/4) lalu. Lokasi tersebut dipilih karena luas lahan yang ada memenuhi persyaratan. "Luasnya sekitar 10,2 hektare atau sesuai syarat di atas lima hektare," kata Wildan kemarin (29/4).

Menurut dia, anggaran bakal disiapkan pemerintah pusat untuk pembangunan fasilitas pendidikan terpadu. Mulai dari ruang belajar, asrama, hingga sarana penunjang seperti lapangan dan fasilitas umum lainnya.

Lahan Merupakan Aset Pemkab

Wildan menjelaskan bahwa lahan tersebut dipilih juga karena secara administrasi lahan merupakan aset milik Pemkab. Sehingga secara legalitas aman untuk digunakan. Meski begitu, masih ada persoalan yang

belum tuntas. Yakni politeknik harus direlokasi terlebih dahulu.

"Skema pemindahan belum tahu. Yang jelas, kami telah mengirimkan surat ke pemerintah pusat," tambahnya. (ful/hen)

KOMINFO KABUPATEN

KONSISTENSI: Bupati Sidoarjo Subandi menerima penghargaan sebagai kabupaten dengan kinerja tertinggi se-Indonesia.



Raih Prestasi Kinerja Kabupaten Tertinggi Se-

SIDOARJO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo kembali menorehkan prestasi gemilang di kancah nasional. Berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD), Sidoarjo dinobatkan sebagai kabupaten dengan kinerja tertinggi se-Indonesia dengan perolehan skor 3,6389. Capaian itu menjadi bukti nyata konsistensi jajaran Pemkab Sidoarjo dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat Kota Delta.

Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan bahwa penghargaan tersebut merupakan buah dari kerja kolektif seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Menurutnya, capaian membangun

Dokumen Teknis Rampung, Lahan Flyover Gedangan Mulai Dibebaskan Mei

Pemkab Sudah Susun Penlok

SIDOARJO - Detail Engineering Design (DED) atau dokumen perencanaan teknis dari pemerintah pusat mengenai pembangunan flyover (FO) Gedangan rampung. Pemkab mulai menyusun penetapan lokasi (penlok) sebelum melakukan pembebasan lahan yang rencananya dimulai Mei.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBM-SDA) Sidoarjo Muhammad Makhmud menjelaskan bahwa penlok jadi dasar pembebasan lahan. Setelah dokumen selesai, pemkab akan langsung melakukan sosialisasi. Seluruh warga yang terdampak pembangunan akan dikumpulkan.

"Setelah lahan siap, pembangunan fisik segera digarap. Target konstruksi mulai 2027," kata Makhmud. Dia optimis pengadaan lahan bisa selesai



SEMRAWUT: Pembangunan flyover diharapkan mengurai kemacetan di perempatan Gedangan.

akhir tahun ini. Proses pembebasan tak sulit karena sebagian bangunan terdampak merupakan aset pemerintah.

Menurut Makhmud, sempat ada perubahan desain rencana pembangunan FO Gedangan. Pembangunan akan difokuskan pada di sisi

timur jalan. Sehingga akan berdampak pada sejumlah bangunan yang merupakan pelayanan masyarakat. Seperti Mapolsek Gedangan.

"Polsek Gedangan sudah pasti terdampak. Namun lokasi baru belum ditentukan," kata Makhmud. Dia menga-

takan bahwa pemkab hanya menyiapkan lahan untuk pembangunan. Untuk konstruksi nantinya pakai APBN.

Solusi Atasi Kemacetan

Flyover Gedangan rencananya memiliki panjang 475

PEMBEBASAN LAHAN FO GEDANGAN

Pembebasan lahan ditargetkan tuntas 2026

Anggaran yang disiapkan Rp 200 miliar

Ada 157 bidang yang berpotensi terdampak

Pembebasan fokus di sisi timur jalan

Sumber: Pemkab Sidoarjo

GRAFIS: MERLAMBAH/JAWA POS

meter. Total lahan terdampak mencapai sekitar 157 bidang dengan jumlah warga sekitar 160 jiwa. Pemkab telah menyiapkan sekitar Rp 200 miliar untuk pembebasan lahan.

Nantinya, jalan layang ini akan memiliki dua jalur dan empat lajur dengan masing-masing dua lajur mengarah ke utara dan dua lajur ke selatan. Pembangunan FO Gedangan bisa menjadi solusi permanen untuk mengatasi kepadatan lalu lintas di wilayah tersebut. (ful/hen)

Jawa Pos

Dewan Soroti Proyek FR Tahun 2025

Target 700 Meter, Realisasi 10 Meter

Sidoarjo, HARIAN BANGSA

Pelaksanaan proyek Frontage Road (FR) pada tahun 2025 disoroti DPRD Sidoarjo. Sebab progres pembangunan FR tahun 2025 ternyata lebih rendah jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Dalam dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Sidoarjo tahun anggaran 2025 disebut total pembangunan FR sejak 2021 hingga 2025 mencapai sekitar 7.778,9 meter.

Terinci pada tahun 2021 sepanjang 1.290 meter, sepanjang 3.003,9 meter di tahun 2022, sepanjang 1.093 meter di tahun 2023 dan sepanjang 2.391 meter pada tahun 2024 lalu.

Namun, memasuki tahun 2025 lalu, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBMSDA) Sidoarjo hanya mampu merealisasikan pembangunan FR sepanjang 10 meter dari target 700 meter.

Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo, Choirul Hidayat menyatakan, capaian pembangunan FR pada tahun 2025 lalu sangat memprihatinkan dan jauh dari ekspektasi.

“Kalau melihat trend sebelumnya, capaian bisa ribuan meter pertahun. Tapi di tahun 2025, hanya 10 meter saja. Ini jelas ada yang tidak berjalan sebagaimana mestinya,” tandasnya kepada wartawan, kemarin.

Politikus PDIP ini pun meminta Dinas PUBMSDA Sidoarjo segera melakukan evaluasi menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan dilapangan. Ia juga meminta adanya transparansi terkait kendala yang menyebabkan target 700 meter tidak tercapai di tahun 2025 lalu.

Choirul Hidayat menegaskan, pembangunan FR memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran arus lalu lintas di Kabupaten Sidoarjo, terutama di kawasan tersebut yang dikenal padat kendaraan. Jika tidak segera diselesaikan, potensi kemacetan akan terus menjadi persoalan yang berlarut-larut. (sta/rus)

CS Dipindai dengan CamScanner

HARIAN
BANGSA

Koran Warga Jatim

Dewan Pengawas Minta Layanan Inovasi RSUD RT Notopuro Sidoarjo Tidak Berhenti

Pelayanan prima harus terus dilakukan dan ditingkatkan oleh RSUD RT Notopuro Sidoarjo. Tidak hanya membangun fasilitas gedung yang megah saja, tetapi pelayanan juga harus bisa terus memuaskan masyarakat. Demikian pesan salah satu Dewan Pengawas RSUD Notopuro Sidoarjo, Kepala Bappeda Sidoarjo, M. Ainur Rahman AP Msi, Rabu (29/4) kemarin, saat ikut dalam kegiatan forum konsultasi publik (FKP) yang digelar di Ballroom Nusantara, RSUD Notopuro, Sidoarjo.

Ainur mengatakan, harus diakui, saat ini masyarakat Sidoarjo harus bangga telah mempunyai RSUD Tipe A, yang pelayanannya representatif baik di tingkat Provinsi Jawa Timur maupun di Indonesia. "Tetapi pelayanan yang baik tidak berhenti begitu saja, tetapi terus berjalan, untuk bisa menuju pelayanan yang baik harus ada kolaborasi, pemerintah dan masyarakat," komentar mantan Asisten Tata Pemerintahan dan Kesra Pemkab Sidoarjo itu, saat memberikan sambutan, dalam FKP

yang punya fokus untuk strategi pengembangan layanan rumah sakit dan penguatan layanan kesehatan Terpadu tersebut.

Kegiatan FKP sangat dibutuhkan untuk bisa tahu saran dan kritik dari masyarakat dan pasien serta pihak lain. Dengan saran dan kritik, RSUD Notopuro Sidoarjo akan bisa berbenah diri atas kekurangan pelayanan yang ada. Salah satu masukan atau kritikan terbanyak dari masyarakat pada tahun 2025 lalu, kata Ainur Rahman, adalah layanan antrian pada klinik. Dibanding

dengan yang ada, kritikan atas layanan ini nilainya 59 persen.

"Ini menjadi tantangan kita bersama sama, agar komplain ini secara bertahap bisa kita kurangi," kata Ainur, memberikan pesan.

Masukan dari Kepala BPKAD Kabupaten Sidoarjo, Khusnul Inayah SE, salah satu dewan pengawas RSUD Notopuro Sidoarjo, pihak manajemen RSUD Notopuro Sidoarjo, agar bisa membangun layanan komunikasi yang baik dengan masyarakat. Para petugas harus memberikan layanan secara bermartabat kepada pasien dan keluarga pasien. Dengan komunikasi yang enak, dimungkinkan bisa berpengaruh pada Kesembuhan para pasien.

Dirut RSUD Notopuro Sidoarjo, dr Atok Irawan SpP Mkes, menanggapi kalau kegiatan FKP tersebut memang sangat penting untuk peningkatan pelayanan. Karena itu,

kegiatan FKP setiap tahun selalu digelar. "Kegiatan FKP ini merupakan wadah, saran bagi kami untuk membenah memperbaiki kekurangan. Maka setiap tahun selalu kita adakan," ujarnya.

Hadir dalam acara FKP ini diantaranya anggota Dewan pengawas RSUD Notopuro, para Wadir, anggota manajemen, perangkat daerah terkait, unsur masyarakat, akademisi dan media. Selama dirinya memimpin di manajemen rsud notopuro Sidoarjo, pembangunan layanan infrastruktur sarana hampir selesai. Meski demikian layanan eksternal dan internal harus terus bergerak untuk ditingkatkan. "Layanan eksternal yang baru saja kami lakukan adalah, membangun kamar operasi jantung by pass," ujarnya.

Wadir pelayanan RSUD Notopuro Sidoarjo, dr Prima Dessy Kusuma Rakhmawati, M.Kes,

mengatakan petugas layanan kesehatan yang ada di RSUD Notopuro ada sebanyak 2.050 orang, yang tersebar pada 36 layanan klinik kesehatan dan 700 tempat tidur untuk pasien. "RSUD Notopuro Sidoarjo menjadi tipe A pada tahun 2023 lalu," ujarnya.

Tantangan manajemen kedepan adalah, selain membangun sarana prasarana fisik, yang tidak kalah pentingnya adalah juga membangun sistem layanan. Agar pelayanan kepada masyarakat, bisa cepat dan memuaskan bagi pasien dan keluarga pasien. [kus.ca]



Dirut RSUD Notopuro Sidoarjo, dr Atok Irawan, didampingi para Wadir, dan Dewan Pengawas, dalam acara FKP tahun 2026.

HARIAN
Bhirawa

ECERAN: Rp 5.000

Temui Menteri Kebudayaan, Wabup Dorong Revitalisasi Warisan Jenggala



SINERGIS: Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana (dua dari kiri) bersama suami yang menjadi anggota DPR RI 2019-2024, Rahmat Muhajirin (kiri), menemui Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon di Jakarta, Senin (27/4).

KOTA-Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana bersama suami yang menjadi anggota DPR RI 2019-2024, Rahmat Muhajirin, menemui Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon di Jakarta, Senin (27/4).

Pertemuan tersebut membahas upaya pelestarian dan pengembangan budaya lokal Sidoarjo yang berakar dari sejarah Kerajaan Jenggala.

Dalam pertemuan itu, Wabup Mimik menegaskan pentingnya menghidupkan kembali nilai-nilai budaya Jenggala seba-

gai bagian dari identitas Sidoarjo. Ia menjelaskan, Kerajaan Jenggala memiliki peran penting dalam sejarah berdirinya wilayah tersebut.

"Kerajaan Jenggala didirikan oleh Raja Airlangga pada tahun 1042 M untuk menghindari perang saudara. Wilayah kekuasaan dibagi dengan Panjalu agar tidak terjadi perebutan tahta. Sidoarjo ini cikal bakal-nya dari situ," jelasnya.

Menurut Mimik, semangat berbagi kekuasaan yang diwariskan dari sejarah Jenggala masih

relevan dengan tata kelola pemerintahan saat ini. Ia menyinggung pentingnya kolaborasi dan pembagian peran dalam menjalankan pemerintahan.

"Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, prinsipnya adalah berbagi peran.

Saya ingin menghentikan 'hawa panas' di Pendopo. Jangan ada konflik, tetapi bagaimana berbagi kewenangan untuk kepen-

tingan rakyat," tegasnya. Sementara itu, Rahmat Muhajirin menambahkan bahwa budaya dan kearifan lokal Jenggala perlu kembali diangkat agar lebih dikenal luas. Menurutnya, Sidoarjo memiliki kekayaan tradisi yang beragam dan potensial untuk dikembangkan.

"Kita ingin budaya Sidoarjo tidak hanya hidup, tetapi juga berkembang dan dikenal luas. Mulai dari kesenian jaranan, wayang, tradisi pesisir, hingga nilai-nilai yang

● Ke Halaman 10



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

✓
Temui Menteri Kebudayaan,...
diwariskan dari Putri Jenggolo,"
ujarnya.
Kerajaan Jenggala sendiri diketahui
berpusat di wilayah Delta Brantas

yang diyakini berada di kawasan
Gedangan, Sidoarjo. Meski peningga-
lan fisiknya terbatas, nama "Jenggolo"
masih melekat kuat dalam berbagai
tradisi lokal hingga saat ini.
Mimik menekankan bahwa pelestari-

rian budaya tidak bisa dilakukan
secara parsial, melainkan membutuh-
kan sinergi antara pemerintah pusat
dan daerah.
"Pelestarian budaya butuh kolabo-
rasi. Tidak bisa berjalan sendiri.

Harus ada dukungan dari pemerintah
pusat agar upaya ini bisa maksimal,"
katanya.
Hasil pertemuan tersebut rencana-
nya akan ditindaklanjuti melalui pro-
gram konkret antara Kementerian Ke-

budayaan dan Pemerintah Kabupaten
Sidoarjo. Langkah ini diharapkan
mampu menghidupkan kembali wari-
san budaya Jenggala sekaligus mem-
perkuat identitas daerah di tengah
perkembangan zaman. (dik/vga)



Disperindag Imbau UMKM Beralih ke Kemasan Alternatif

■ Harga Plastik Naik

KOTA-Lonjakan harga plastik yang masih terjadi hingga April 2026 mulai menekan pelaku usaha, terutama pedagang kecil dan UMKM. Menyikapi kondisi ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Sidoarjo mengimbau pelaku usaha untuk beralih ke kemasan alternatif yang lebih ekonomis dan ramah lingkungan.

Plt Kepala Disperindag Sidoarjo, Happy Setianingtyas melalui Kabid Perdagangan K. Arya Wijojok, menjelaskan bahwa kenaikan harga plastik dipengaruhi faktor global, khususnya ketergantungan

“
Semua berasal
dari pusat,
termasuk
bahan baku,
regulasi, hingga
intervensinya,”

K. Arya Wijojok
Kabid Perdagangan

bahan baku impor.

“Semua berasal dari pusat, termasuk bahan baku, regulasi, hingga intervensinya,” ujar Arya kepada Radar Sidoarjo, Rabu (29/4).

Ia menambahkan, bahan baku plastik yang berasal dari turunan

● Ke Halaman 10



DIMAAFKAN: NR. 24 (dua dari kanan) didampingi petugas

Disperindag lmbau UMKM...

minyak bumi membuat harganya sangat sensitif terhadap kondisi geopolitik dunia, termasuk konflik di Timur Tengah. "Dampaknya dari situ. Bahan bakunya dari nafta, turunan minyak bumi, sehingga konflik global ikut memengaruhi harga," jelasnya.

Menurut Arya, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk

mengendalikan harga plastik. Meski begitu, Disperindag berupaya membantu pelaku usaha dengan memperpendek rantai distribusi. "Upaya kami adalah mendekatkan distributor dengan pelaku usaha agar mata rantai distribusi bisa dipangkas," katanya.

Selain itu, pelaku usaha juga didorong untuk mulai beradaptasi dengan beralih ke kemasan non-plastik, seperti kertas atau kaca. "Sarannya,

plastik bisa diganti dengan bahan kertas atau kaca. Misalnya botol plastik diganti botol kaca, atau minuman disajikan menggunakan gelas yang bisa dicuci ulang," ujarnya.

Disperindag juga mendorong pelaku UMKM untuk melakukan efisiensi penggunaan plastik, seperti menyesuaikan ukuran kemasan, mengurangi bahan berlebih, hingga menerapkan sistem penggunaan ulang

(reuse) dan isi ulang (refill) sebagai solusi jangka panjang.

Meski harga meningkat, Arya memastikan kondisi pasar di Sidoarjo masih relatif stabil dan belum ditemukan praktik penimbunan. "Tidak ada penimbunan. Pengecer masih banyak dan kondisi pasar tidak terlalu bergejolak," ungkapnya.

Ia juga menyebutkan bahwa stok bahan baku plastik secara nasional diperkirakan masih aman dalam waktu

dekat. "Informasi dari pusat, bahan baku masih bertahan sekitar dua bulan," tambahnya.

Disperindag berharap pelaku usaha tetap kreatif dan adaptif dalam menghadapi kenaikan harga ini, tanpa harus langsung membebani konsumen dengan kenaikan harga jual.

"Tidak harus langsung menaikkan harga, bisa dilakukan efisiensi di sisi lain," pungkasnya. (dik/vga)



RAZIA: Petugas gabungan Satpol PP dan Bea Cukai Sidoarjo saat menggelar operasi pemberantasan rokok ilegal di sejumlah wilayah.

Operasi Gabungan, Petugas Amankan Ratusan Bungkus Rokok Ilegal

Maraknya peredaran rokok ilegal di Kabupaten Sidoarjo mendorong aparat gabungan untuk bergerak cepat. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama Bea Cukai menggelar sosialisasi sekaligus operasi penindakan guna menjaga penerimaan negara dari sektor cukai.

Suryanto, Wartawan Radar Sidoarjo

KEGIATAN ini dipimpin oleh Kabid Gakda Satpol PP Sidoarjo, Anas Ali Akbar, SSTP, dengan melibatkan unsur Satpol PP, Subdenpom, serta Bea Cukai Sidoarjo.

Plt Kabid Tibum Satpol PP Sidoarjo, R. Novianto Koesno Adi Putro, menjelaskan bahwa operasi ini merupakan upaya

berkelanjutan untuk menekan peredaran rokok ilegal sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat agar lebih taat aturan.

"Kami bersama tim gabungan terus mengencarkan sosialisasi dan penindakan terhadap peredaran rokok

● Ke Halaman 10





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Operasi Gabungan....

ilegal di wilayah Sidoarjo. Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga edukasi kepada masyarakat agar tidak memperjualbelikan rokok tanpa cukai karena merugikan negara," ujarnya.

Rabu (29/4).

Dalam apel persiapan, seluruh petugas diarahkan untuk bekerja sesuai standar operasional prosedur (SOP), bersikap tegas namun tetap mengedepankan pendekatan humanis. Untuk meningkatkan efektivitas, operasi dibagi menjadi dua tim yang menyasar

sejumlah wilayah.

Selain penindakan, petugas juga melakukan sosialisasi langsung dengan menempelkan stiker "Gempur Rokok Ilegal" di toko-toko kelontong sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat.

Usai apel, tim bergerak menuju wilayah Buduran dan Sedati. Di Desa

Prasung, petugas berhasil mengamankan 90 bungkus rokok ilegal dari penjual rumah.

Penindakan kemudian berlanjut di Desa Damarsi dengan temuan sebanyak 206 bungkus rokok ilegal. Sementara di Desa Kwangan, petugas kembali mengamankan 267 bungkus

rokok tanpa pita cukai.

"Kami mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk lebih sadar hukum. Jika ditemukan pelanggaran, akan kami tindak sesuai aturan, namun tetap mengedepankan pendekatan humanis," tambah Novianto. (sur/vga)



UMSIDA dan Tjiwi Kimia Bahas Strategi 3R, Dorong Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan

KOTA-Upaya menghadapi tantangan pengelolaan lingkungan terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor. PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk bersama Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (UMSIDA) menggelar sharing session bertajuk Penerapan 3R (Reduce, Reuse, Recycle): Strategi Menghadapi Tantangan Pengelolaan Lingkungan, Senin (27/4).

Kegiatan yang berlangsung di Mini Theater Lantai 5 GKB 2 Kampus 1 UMSIDA ini menghadirkan para praktisi dan akademisi untuk membahas strategi pengelolaan lingkungan berbasis prinsip 3R.

Acara tersebut juga dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerja sama (MoA) antara Tjiwi Kimia dan UMSIDA, serta antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Sidoarjo dengan UMSIDA.

Sejumlah narasumber



KOLABORASI: Rangkaian penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerja sama (MoA) antara Tjiwi Kimia dan UMSIDA.

hadir dalam kegiatan ini, di antaranya Plt Kepala DLHK Sidoarjo Arif Mulyono, Public Affair & License Manager PT Tjiwi Kimia Beny Haryawan,

serta Ketua Pusat Studi Lingkungan dan Smart City (PSLSC) UMSIDA, Dr Syamsudduha Syahririni.

Kegiatan yang diseleng-

garakan oleh PSLSC UMSIDA ini juga melibatkan berbagai pihak. Seperti Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana

Pimpinan Daerah 'Aisyiyah (LLHPB PDA) Sidoarjo, para dosen peneliti bidang lingkungan, serta mahasiswa.

Direktur Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) UMSIDA, Prof Sigit Hermawan, menegaskan bahwa isu lingkungan menjadi perhatian penting yang harus terus dikaji, khususnya di wilayah perkotaan.

"Di UMSIDA, kepedulian terhadap lingkungan telah menjadi bagian dari program kerja mahasiswa, salah satunya melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN)," ujarnya.

Sementara itu, Public Affair & License Manager PT Tjiwi Kimia Beny Haryawan memaparkan berbagai langkah konkret yang telah diterapkan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan.

"Tidak hanya menerapkan konsep 3R, perusahaan juga mengembangkan program hingga 5R, yakni Reduce, Reuse, Recycle, Replace, dan Replant," ujarnya. (dik/vga)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

DLHK Petakan 209 TPS3R, Siapkan Penguatan Fasilitas pada 2027

KOTA-Upaya pembena-
han sistem pengelolaan sam-
pah di Kabupaten Sidoarjo
mulai dipercepat. Dinas
Lingkungan Hidup dan Ke-
bersihan (DLHK) setempat
tengah memetakan ratusan
Tempat Pengelolaan Sampah
Reduce, Reuse, Recycle (TPS-
3R) guna menentukan arah
pengembangan ke depan.

Kepala DLHK Sidoarjo,
Arif Mulyono, mengungkap-
kan bahwa saat ini pihaknya
melakukan pendataan ter-
hadap 209 TPS3R yang ter-
sebar di berbagai wilayah.
"Kami memetakan lebih

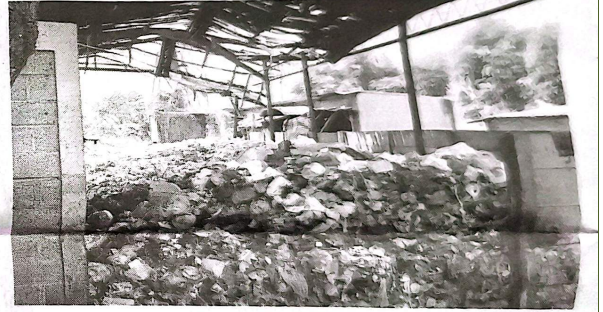
dari 200 TPS3R bersama
tim," ujarnya kepada Radar
Sidoarjo, Rabu (29/4).

Menurut Arif, pemetaan
tersebut bertujuan untuk
mengetahui kondisi riil ope-
rasional TPS3R, baik yang
masih aktif maupun yang ti-
dak beroperasi. Selain itu,
TPS3R yang aktif juga akan
diklasifikasikan berdasar-
kan tingkat kinerjanya.

"Kami data mana yang
aktif dan tidak aktif. Lalu
yang aktif kami kelompok-
kan lagi, apakah masuk ka-
tegori sangat baik, sedang,
atau kurang," jelasnya.

Hasil pemetaan ini akan
menjadi dasar dalam peny-
usunan kebijakan, termas-
uk pengajuan anggaran
pada tahun mendatang.
DLHK pun telah menyiap-
kan rencana penguatan
sarana dan prasarana bagi
TPS3R yang masih membu-
tuhkan dukungan.

"Pada 2027 kami akan me-
ngusulkan anggaran untuk
kebutuhan seperti hanggar,
mesin pemilah, hingga
conveyor untuk pengangkut-
an. Semua akan kami ajuk-
kan dalam APBD 2027,"
terangnya. (dik/vga)



DIPETAKAN: TPS3R di Sidoarjo yang butuh pengawasan untuk pemila-
han sampah.



Abdillah Nasih Dorong Pengelolaan Sampah yang Lebih Rapi dan Berkelanjutan

 **Siska Prestiwati**
29 Apr 2026 16:22

TERUPDATE PEMERINTAHAN EKONOMI BISNIS 0 24

2 MINUTES READING



Related posts

Tiga Hari Hilang, Tim SAR Gabungan Temukan Rakim di Perairan Gresik

Massa Aksi Buruh di Jatim Berjalan Tertib, Polresta Sidoarjo Kawal Hingga Batas Kota Surabaya

Pj Sekda Alor Buka FGD Pemaparan Hasil Ekspedisi Patriot UGM Soal Potensi Kawasan Transmigrasi

Update Tabrakan KA Argo Bromo vs KRL: 6 Meninggal, 80 Luka-Luka

Warih Andono Bongkar Kondisi Damkar Sidoarjo: Banyak Alat Tak Layak Pakai

ARTOTEL TS Suites Surabaya Hadirkan Keceriaan Ramadan bersama Anak-Anak Panti Asuhan

Sidoarjo (Aksaraindonesia.id) – Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, Abdillah Nasih, mengajak pemerintah dan masyarakat melihat pengolahan sampah sebagai proses yang membutuhkan persiapan matang. Menurutnya, rencana pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PSEL) memang membuka peluang baru, namun tetap perlu langkah terukur agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas.

"PSEL ini menarik sekali, tapi kita perlu duduk bersama untuk merencanakan semuanya," ujar Abdillah dengan nada santai saat berkunjung ke Kantor DLHK Sidoarjo, Rabu (29/4/2026).



Read Also

DPRD Jatim Nilai Kinerja BUMD Tertinggal, Pansus Targetkan Evaluasi Tuntas 6 Bulan

19 JAN 2026

Ia menekankan pentingnya master plan pengolahan sampah yang jelas. Bagi Abdillah, dokumen tersebut bukan sekadar rencana teknis, tetapi panduan agar Sidoarjo bisa mengelola sampah secara berkelanjutan—mulai dari menghitung jumlah sampah harian, kebutuhan anggaran, hingga bagaimana program zero waste di TPS tetap berjalan berdampingan dengan rencana PSEL.

"Kalau semua terukur sejak awal, kita bisa melihat manfaat nyatanya, bukan hanya untuk pemerintah, tapi juga untuk masyarakat dan lingkungan," tuturnya.

Kepala DLHK Sidoarjo, Arif Mulyono, turut menjelaskan bahwa adanya PSEL akan membantu mengurangi beban Tempat Pembuangan Akhir TPA Jabon. Saat ini, ketinggian tumpukan sampah di lokasi tersebut sudah mencapai sekitar 20 meter. Dengan rencana pengiriman 150 ton sampah per hari, masa pakai TPA bisa lebih panjang.



Read Also

Gubernur Khofifah Serahkan Santunan Ahli Waris Keluarga Korban KMP Tunu di Banyuwangi

12 JUL 2025



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

DIPERBARUI

Meninggal, 80 Luka-Luka

Warih Andono Bongkar
Kondisi Damkar Sidoarjo:
Banyak Alat Tak Layak
Pakai

ARTOTEL TS Suites
Surabaya Hadirkan
Keceriaan Ramadan
bersama Anak-Anak Panti
Asuhan

Ia menekankan pentingnya master plan pengolahan sampah yang jelas. Bagi Abdillah, dokumen tersebut bukan sekadar rencana teknis, tetapi panduan agar Sidoarjo bisa mengelola sampah secara berkelanjutan—mulai dari menghitung jumlah sampah harian, kebutuhan anggaran, hingga bagaimana program zero waste di TPS tetap berjalan berdampingan dengan rencana PSEL.

“Kalau semua terukur sejak awal, kita bisa melihat manfaat nyatanya, bukan hanya untuk pemerintah, tapi juga untuk masyarakat dan lingkungan,” tuturnya.

Kepala DLHK Sidoarjo, Arif Mulyono, turut menjelaskan bahwa adanya PSEL akan membantu mengurangi beban Tempat Pembuangan Akhir TPA Jabon. Saat ini, ketinggian tumpukan sampah di lokasi tersebut sudah mencapai sekitar 20 meter. Dengan rencana pengiriman 150 ton sampah per hari, masa pakai TPA bisa lebih panjang.



Read Also

**Gubernur Khofifah Serahkan
Santunan Ahli Waris Keluarga
Korban KMP Tunu di Banyuwangi**

12 JUL 2025

“Ini salah satu cara untuk menjaga lingkungan kita tetap nyaman,” ungkap Arif.

Ia menyampaikan bahwa PSEL direncanakan mulai berjalan pada 2028, sementara DLHK saat ini masih mematangkan perhitungan biaya operasional dan skema pengiriman sampah ke TPA Benowo setiap hari.

Dengan perencanaan yang lebih rapi dan kerja sama banyak pihak, pengolahan sampah di Sidoarjo diharapkan bukan hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga langkah bersama untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

ABDILLAH NASIH

KETUA DPRD KABUPATEN SIDOARJO

SAMPAH

DLHK



Tarif Parkir RSUD Notopuro Disoal, DPRD hingga JCW Desak Evaluasi: "Jangan Bebani Pasien"

 **Siska Prestiwati**
 29 Apr 2026 17:47

TERUPDATE PEMERINTAHAN KESEHATAN 0 14

2 MINUTES READING



Related posts

Peringati HUT Kemerdekaan RI, Mercure Surabaya Grand Mirama Gelar Upacara Bendera hingga Karnaval

Polresta Sidoarjo Ungkap Peredaran Sabu dan Ganja, Tiga Tersangka Diamankan

Percepat Konektivitas Jember-Banyuwangi dan Pulihkan Ekonomi Masyarakat, Pemprov Jatim Buka Jalur Gumitir

Tegakkan Satuan Solid, Danrem 084/BJ Kenalkan "MANTAP" di Kodim 0816 Sidoarjo

SDN Kedungturi Luncurkan Aplikasi "Kids" untuk Permudah Komunikasi dengan Wali Murid

Forkopimda Hadiri Apel Kehormatan dan Renungan Suci di TMP Kusuma Bangsa

Sidoarjo (Aksaraindonesia.id) – Kebijakan tarif parkir progresif di RSUD Notopuro Sidoarjo kembali menuai kritik dalam forum hearing bersama DPRD Sidoarjo, Rabu (29/4). Sejumlah peserta menilai penerapan tarif per jam berpotensi membebani pasien dan keluarga yang harus menunggu dalam waktu lama di rumah sakit.

Salah satu warga, Ajis, mengaku sistem yang diberlakukan saat ini tidak mencerminkan keberpihakan terhadap kondisi pasien.



Read Also
Forkopimda dan Pemkab Alor Matangkan Persiapan Pekan Wisma Raya I 2025

01 OCT 2025

"Mohon benar-benar dievaluasi. Ini layanan kesehatan, bukan area komersial. Keluarga pasien bisa menunggu berjam-jam," ujarnya dalam forum tersebut.

Pihak manajemen RSUD Notopuro menjelaskan bahwa penerapan tarif progresif mengacu pada sejumlah regulasi, mulai PP No. 23/2005 yang diperbarui menjadi PP No. 74/2012 soal pengelolaan keuangan BLUD, PP No. 28/2020 mengenai barang milik daerah, hingga Permendagri 79. Kebijakan itu juga tercantum dalam Perda Sidoarjo No. 4/2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Meski demikian, manajemen menegaskan bahwa aspek kemanusiaan tetap menjadi pertimbangan. Beberapa pengecualian tarif disiapkan untuk pasien rawat inap, pasien hemodialisa, dan pengunjung dengan kebutuhan khusus.



Read Also
RAPBD Jatim 2026 Disepakati: Pendapatan Rp26,3 T, Belanja Rp27 T, Gunakan SILPA Rp911 M

12 NOV 2025



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Related posts

Peringati HUT
Kemerdekaan RI, Mercure
Surabaya Grand Mirama
Gelar Upacara Bendera
hingga Karnaval

Polresta Sidoarjo Ungkap
Peredaran Sabu dan
Ganja, Tiga Tersangka
Diamankan

Percepat Konektivitas
Jember-Banyuwangi dan
Pulihkan Ekonomi
Masyarakat, Pemprov
Jatim Buka Jalur Gumitir

Tegakkan Satuan Solid,
Danrem 084/BJ Kenalkan
"MANTAP" di Kodim 0816
Sidoarjo

SDN Kedungturi Luncurkan
Aplikasi "Kids" untuk
Permudah Komunikasi
dengan Wali Murid

Forkopimda Hadiri Apel
Kehormatan dan
Renungan Suci di TMP
Kusuma Bangsa

Sidoarjo (Aksaraindonesia.id) – Kebijakan tarif parkir progresif di RSUD Notopuro Sidoarjo kembali menuai kritik dalam forum hearing bersama DPRD Sidoarjo, Rabu (29/4). Sejumlah peserta menilai penerapan tarif per jam berpotensi membebani pasien dan keluarga yang harus menunggu dalam waktu lama di rumah sakit.

Salah satu warga, Ajis, mengaku sistem yang diberlakukan saat ini tidak mencerminkan keberpihakan terhadap kondisi pasien.



Read Also

**Forkopimda dan Pemkab Alor
Matangkan Persiapan Pekan
Wisma Raya I 2025**

01 OCT 2025

"Mohon benar-benar dievaluasi. Ini layanan kesehatan, bukan area komersial. Keluarga pasien bisa menunggu berjam-jam," ujarnya dalam forum tersebut.

Pihak manajemen RSUD Notopuro menjelaskan bahwa penerapan tarif progresif mengacu pada sejumlah regulasi, mulai PP No. 23/2005 yang diperbarui menjadi PP No. 74/2012 soal pengelolaan keuangan BLUD, PP No. 28/2020 mengenai barang milik daerah, hingga Permendagri 79. Kebijakan itu juga tercantum dalam Perda Sidoarjo No. 4/2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Meski demikian, manajemen menegaskan bahwa aspek kemanusiaan tetap menjadi pertimbangan. Beberapa pengecualian tarif disiapkan untuk pasien rawat inap, pasien hemodialisa, dan pengunjung dengan kebutuhan khusus.



Read Also

**RAPBD Jatim 2026 Disepakati:
Pendapatan Rp26,3 T, Belanja
Rp27 T, Gunakan SILPA Rp911 M**

12 NOV 2025

"Ada dispensasi yang kami berikan, terutama untuk pasien dan keluarga yang menjalani perawatan jangka panjang," jelas perwakilan manajemen.

Manajemen rumah sakit juga mengungkapkan adanya penyalahgunaan area parkir oleh pihak yang tidak berkepentingan, seperti menitipkan kendaraan dalam waktu lama, sehingga mengurangi kapasitas parkir bagi pasien.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Sidoarjo, Gus Wawan, menilai bahwa meskipun regulasi mengizinkan sistem progresif, implementasinya harus tetap sensitif terhadap situasi warga.

"Ini layanan publik. Kalau kebijakan justru membebani masyarakat yang sedang kesulitan, perlu dikaji ulang," tegasnya.

Ia menyebut DPRD membuka peluang revisi jika ditemukan ketidaksesuaian di lapangan, termasuk kemungkinan perubahan Perda.

Sorotan keras juga datang dari Ketua Umum JCW, Sigit Imam Basuki. Ia menilai denda kehilangan karcis parkir sebesar Rp15 ribu untuk motor dan Rp30 ribu untuk mobil tidak memiliki dasar hukum dalam Perda.

"Kalau tidak tertulis dalam regulasi, seharusnya tidak diberlakukan. Fasilitas publik jangan sampai dikomersialisasi," ujarnya.

Dalam hearing tersebut, sejumlah catatan disepakati, seperti perlunya evaluasi tarif progresif, peningkatan transparansi pengelolaan parkir, serta sosialisasi yang lebih jelas kepada masyarakat terkait hak dan kewajiban pengguna layanan.

DPRD Sidoarjo memastikan akan mengkaji ulang kebijakan tarif parkir RSUD Notopuro agar lebih berkeadilan dan tidak menambah beban bagi pasien serta keluarganya.

DPRD KABUPATEN SIDOARJO

HEARING

PASIE

TARIF PARKIR PROGRESIF

RSUD NOTOPURO



Langkah Cerdas Wabup Mimik Idayana, Sekali Gerak Gaet 60 Miliar Dana Perbaikan Untuk Ribuan Sekolah

dimensin | 28 April 2026, 12:52 pm | 0 comments | 89 views



Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo Hj Mimik Idayana SAP.

DIMENSINEWS.COM SIDOARJO: Untuk kesekian kalinya, Wakil Bupati Hj. Mimik Idayana S.A.P melakukan terobosan cerdas ke pemerintah pusat. Tak tanggung-tanggung, upaya terobosan yang dilakukan orang nomor dua Sidoarjo itu berbuah sangat manis, dimana melalui lobi-lobi politik akhirnya pihak pemerintah pusat tahun ini dipastikan bakal mengucurkan kembali dana Rp 60 miliar yang kesemua anggaran tersebut dialokasikan untuk perbaikan sedikitnya 1.100 sekolah SDN dan SMPN yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo. Kepastian kucuran dana pusat menopang peningkatan pembangunan infrastruktur pendidikan ini diungkapkan Wabup Mimik saat dikonfirmasi fenomena kondisi bangunan sekolah banyak yang rusak, bahkan mengancam keselamatan siswa. "Ya, memang memprihatinkan, di Sidoarjo ternyata masih banyak bangunan sekolah yang rusak dan perlu percepatan perbaikan. Dan alhamdulillah, pemerintah pusat mendengar permasalahan ini," katanya, pada Selasa (28/4/2026) siang.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Sidoarjo bahwa saat ini sebanyak 1.100 sekolah, -mulai SDN hingga SMPN yang rusak, bahkan bisa mengancam keselamatan siswa dan para guru. Untuk percepatan perbaikan agar kelangsungan pendidikan nyaman dan aman, tentunya tidak bisa mengandalkan kekuatan dana APBD semata. Sehingga salah satu langkah strategis dilakukan Mak Mimik, sapaan Wabup yang juga menjabat ketua DPC Partai Gerindra Sidoarjo ini adalah melakukan lobi-lobi ke kementerian terkait. Alhasil, upayanya tidak sia-sia, -untuk perbaikan bangunan sekolah itu pihak pemerintah pusat pada anggaran tahun ini telah mengucurkan dana Rp 60 miliar. "Semula hanya diberi Rp 50 miliar, dan saya minta tambahan karena begitu banyaknya bangunan sekolah yang perlu direnovasi. Akhirnya ditambah Rp 10 miliar, sehingga menjadi Rp 60 miliar," ujarnya. Dengan kucuran dana pusat ini, pihaknya berharap perbaikan bangunan sekolah bisa segera dilakukan karena dinilai begitu urgen untuk kenyamanan dan keselamatan kelangsungan kegiatan belajar siswa. Dalam perbaikan bangunan sekolah ini juga diharapkan berjalan baik dan berkualitas.

"Soal pagu berapa besar anggaran untuk perbaikan masing-masing sekolah tentunya berbeda. Disesuaikan dengan tingkat kerusakan bangunan yang perlu diperbaiki berdasarkan proposal diajukan pihak sekolah," katanya.

"Saya sendiri yang akan mengawasi langsung di lapangan," tambah Mak Mimik.

Keberhasilan Wabup Mimik meraih dana pusat untuk percepatan pembangunan di Sidoarjo pada tahun ini, tentunya bukan kali pertama. Dia dikenal bekerja tanpa pamrih, dan juga tidak butuh pencitraan, namun hasilnya nyata yang bermuara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sidoarjo.

Sebelumnya, lobi-lobinya juga menghasilkan anggaran pusat sebesar Rp 84 miliar untuk kelanjutan betonisasi jalan lingkar timur Sidoarjo. Selain itu, untuk menopang program renovasi rumah tidak layak huni (RTLH) Sidoarjo, Wabup Mimik berhasil mendapatkan suntikan dana pusat Rp 36 miliar untuk perbaikan 1.200 rumah warga. (Dill)

Posted in Birokrasi

Share:      



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

LEGISLATIF

Abah Usman Beri Perhatian Penuh Kondisi Puskesmas Urang Agung Sidoarjo

Admin — 29/04/2026

Share

🕒 Read Time: 1 Minute, 8 Second



SIDOARJO (liputansidoarjo.com)-

Perluasan atau peningkatan kapasitas pelayanan Puskesmas Urang Agung Cemengkalan Sidoarjo menjadi lebih baik, menjadi perhatian serius dari H.Usman MKes anggota komisi D DPRD Sidoarjo.



Pasalnya, kondisi lahan Puskesmas Urang Agung yang terbatas, sudah tidak sebanding dengan jumlah pasien yang membutuhkan layanan kesehatan di Puskesmas utama ini.

Apalagi, Abah Usman sendiri langsung mendapat keluhan dan masukan dari masyarakat Sidoarjo, yang meminta adanya upaya peningkatan sarana prasarana Puskemas Urang Agung, atau jika memungkinkan bisa relokasi ke tempat yang lebih representatif dan luas.

"Masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan di Puskesmas Urang Agung ini cukup banyak, sehingga memang mendesak untuk dilakukan perluasan atau peningkatan kapasitas layanan Puskemas," ujar Abah Usman saat ditemui dalam hearing bersama seluruh kepala Puskesmas se Sidoarjo, Rabu (29/4/2026).

Untuk langkah awal mewujudkan keinginan masyarakat ini, Abah Usman bergerak cepat dengan mengajukan anggaran kajian akademis melalui dana Pokirnya, yang secara teknis diserahkan kepada Bappeda Sidoarjo.

"Kita sudah ajukan anggaran untuk jadian akademis ke Bappeda, untuk mengetahui upaya terbaik apa yang mesti dilakukan untuk peningkatan layanan Puskemas Urang Agung ini. Dan Inshaallah tahun 2026 ini kajian itu akan dilakukan," ungkap Abah Usman.

Dari kondisi di lapangan, Puskemas Urang Agung Cemengkalan, saat ini berada persis di samping Kelurahan Cemengkalan Sidoarjo, dan berdiri mepet di tepi jalan raya.

Luas lahan parkirnya pun terbatas, sehingga ada potensi kerawanan lalu lintas bagi pasien yang berobat. (Abidin)

Liputan Sidoarjo.com

Komisi B DPRD Sidoarjo Hearing RSUD Notopuro, Soroti Tarif Parkir Progresif

Eko Puji - Sidoarjo

April 30, 2026

Komentar

BAGIKAN



SIDOARJO | MMCNEWS – Keluhan masyarakat terkait tarif parkir progresif di RSUD Notopuro yang ramai diperbincangkan, mendapat perhatian serius dari DPRD Sidoarjo. Hal ini dibahas dalam forum hearing Komisi B DPRD Sidoarjo yang digelar pada Rabu (29/4/2026).

Hearing dipimpin oleh Sulamul Hadi Nurmawan, didampingi anggota Muzayin dan Atok Ashari. Turut hadir Ketua LSM Java Corruption Watch (JCW), perwakilan RSUD Notopuro, serta sejumlah perwakilan masyarakat.

Sulamul Hadi Nurmawan, yang akrab disapa Gus Wawan, menyampaikan bahwa meskipun tarif parkir progresif yang diberlakukan saat ini dinilai telah sesuai dengan peraturan daerah (perda), kebijakan tersebut harus tetap mempertimbangkan kondisi masyarakat.

"Tarif parkir progresif yang berlaku sekarang memang sesuai perda. Namun untuk layanan publik seperti rumah sakit, jangan sampai memberatkan masyarakat. Jika terbukti tidak berpihak, maka perda tersebut perlu dikaji ulang atau direvisi," ujarnya.

Dari pihak RSUD Notopuro, dr. M. Atho'illah menjelaskan bahwa penerapan tarif progresif telah mengacu pada ketentuan yang berlaku, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Ia menambahkan, pihak rumah sakit juga telah memberikan kebijakan khusus bagi pasien tertentu.

"Kami menerapkan tarif khusus dengan skema satu parkir untuk satu pasien, khususnya bagi pasien rawat inap dan pasien hemodialisa (cuci darah) yang membutuhkan waktu perawatan cukup lama, sekitar enam jam. Kebijakan ini diberlakukan melalui mekanisme parkir khusus," jelas Atho'illah yang menjabat sebagai Kepala Bagian Perencanaan RSUD Notopuro.

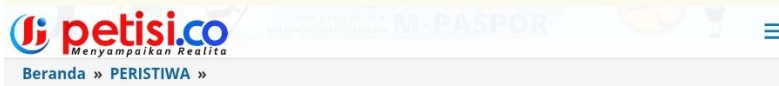
Sementara itu, Ketua JCW Sigit Imam Basuki menyoroti adanya kebijakan denda bagi pengguna yang kehilangan karcis parkir. Menurutnya, ketentuan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

"Denda kehilangan karcis sebesar Rp15 ribu untuk sepeda motor dan Rp30 ribu untuk mobil tidak diatur dalam perda. Jika tidak memiliki dasar hukum, seharusnya tidak diberlakukan karena berpotensi menjadi pungutan liar," tegasnya.

Hearing tersebut menghasilkan sejumlah catatan penting. Di antaranya, perlunya kajian bersama antara DPRD dan pihak eksekutif terkait kemungkinan revisi perda, evaluasi tarif parkir progresif, peningkatan transparansi pengelolaan parkir, serta penguatan sosialisasi kepada masyarakat.

(Sis)

Post Views: 6



Tarif Parkir Progresif Disorot Bermotif Bisnis, RSUD RT Notopuro Berikan Klarifikasi

28 April 2026 11:51 WIB
oleh redaksi



Kasubag Humas RSUD RT Notopuro, Rizqi Maulana Hadi berikan klarifikasi tarif parkir progresif

Sidoarjo, petisi.co – Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Raden Tumenggung (RT) Notopuro akhirnya buka suara terkait tarif parkir progresif yang dinilai memberatkan keluarga pasien.

Kasubag Humas RSUD RT Notopuro, Rizqi Maulana Hadi memastikan tarif parkir progresif tempat khusus tersebut sudah dijalankan sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 tahun 2025.



Ketentuan tarif parkir rawat inap RSUD RT Notopuro tercantum pada papan informasi pintu masuk dan keluar kendaraan

“Sesuai dengan Perda Nomor 4 tahun 2025, berlaku tarif parkir tempat atau lokasi khusus. Untuk motor/R2 Rp 3.000 dan Rp 5.000 mobil/R4. RSUD sebagai bagian dari penyesuaian regulasi retribusi parkir diterapkan tarif progresif, kelipatan hingga 100% setiap 4 jam,” terang Rizqi Maulana Hadi, Senin (27/4/2026).

Rizqi juga meluruskan sorotan publik yang menduga adanya motif kepentingan bisnis dibalik penerapan tarif parkir progresif. ia menegaskan RSUD merupakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) atau rumah sakit milik pemerintah. Sehingga pengelolaan parkir sepenuhnya dijalankan pihak swasta yakni Fabian Duta Rama (FDR).

“Kami klarifikasi dugaan terkait aspek bisnis di belakang penerapan tarif progresif itu tidak benar. Sebab kami ini, rumah sakit pemerintah, fokus pada pelayanan pasien dan hanya menjalankan Perda regulasi parkir. Untuk pengelolaan parkir diserahkan sepenuhnya ke pihak ketiga,” tekannya.

Rizqi menjamin kendaraan keluarga pasien yang menjalani rawat inap, bisa mendapatkan tarif parkir khusus. Ketentuan itu berlaku per 3 hari parkir, untuk motor dikenakan Rp 20.000 dan mobil Rp 30.000.

“Tarif parkir khusus bagi kendaraan pasien yang menjalani rawat ada kok. Tulisan ketentuan itu bisa dilihat di bagian bawah papan parkir di pintu masuk maupun pintu keluar,” ucapnya seraya menunjuk papan informasi tarif parkir yang dimaksud.

Sidoarjo, **petisi.co** - Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Raden Tumenggung (RT) Notopuro akhirnya buka suara terkait tarif parkir progresif yang dinilai memberatkan keluarga pasien.

Kasubag Humas RSUD RT Notopuro, Rizqi Maulana Hadi memastikan tarif parkir progresif tempat khusus tersebut sudah dijalankan sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 tahun 2025.



Ketentuan tarif parkir rawat inap RSUD RT Notopuro tercantum pada papan informasi pintu masuk dan keluar kendaraan

“Sesuai dengan Perda Nomor 4 tahun 2025, berlaku tarif parkir tempat atau lokasi khusus. Untuk motor/R2 Rp 3.000 dan Rp 5.000 mobil/R4. RSUD sebagai bagian dari penyesuaian regulasi retribusi parkir diterapkan tarif progresif, kelipatan hingga 100% setiap 4 jam,” terang Rizqi Maulana Hadi, Senin (27/4/2026).

Rizqi juga meluruskan sorotan publik yang menduga adanya motif kepentingan bisnis dibalik penerapan tarif parkir progresif. Ia menegaskan RSUD merupakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) atau rumah sakit milik pemerintah. Sehingga pengelolaan parkir sepenuhnya dijalankan pihak swasta yakni Fabian Duta Rama (FDR).

“Kami klarifikasi dugaan terkait aspek bisnis di belakang penerapan tarif progresif itu tidak benar. Sebab kami ini, rumah sakit pemerintah, fokus pada pelayanan pasien dan hanya menjalankan Perda regulasi parkir. Untuk pengelolaan parkir diserahkan sepenuhnya ke pihak ketiga,” tekannya.

Rizqi menjamin kendaraan keluarga pasien yang menjalani rawat inap, bisa mendapatkan tarif parkir khusus. Ketentuan itu berlaku per 3 hari parkir, untuk motor dikenakan Rp 20.000 dan mobil Rp 30.000.

“Tarif parkir khusus bagi kendaraan pasien yang menjalani rawat ada kok. Tulisan ketentuan itu bisa dilihat di bagian bawah papan parkir di pintu masuk maupun pintu keluar,” ucapnya seraya menunjuk papan informasi tarif parkir yang dimaksud.

Keluarga pasien bisa mendapatkan tarif parkir khusus rawat inap dengan mengisi formulir yang telah disediakan di meja petugas pendaftaran. Selain itu, informasi parkir dengan tarif khusus juga bisa ditanyakan pada penjaga pintu masuk.

“Keluarga pasien tidak perlu ragu dan bingung. Jika memang mau rawat inap, petugas pendaftaran akan mengarahkan untuk mengisi form parkir tarif khusus. Namun kalau lupa dan sudah terlanjur masuk kamar perawatan, maka bagian pelayanan tenaga kesehatan pasti akan mengingatkan dan menanyakan hal itu,” bebarnya.

Demikian pula, bagi keluarga pasien rawat jalan yang tengah berobat dengan estimasi waktu lebih dari 4 jam, pihak rumah sakit akan memberikan kelonggaran tarif. Seperti pasien yang akan menjalani cuci darah atau Hemodialisis (HD).

“Contoh pasien HD, kita cek ke perawat dibilang 5 jam. Lalu pasien ditanya lamanya waktu cuci darah dijawab 4 jam. Sedangkan dokternya ngomong butuh waktu 6 jam. Maka yang seperti ini, kita beri kelonggaran tarif parkir ikut yang 4 jam,” ujarnya.

Rizqi menyebut ketentuan parkir tarif khusus untuk masing-masing pasien rawat inap hanya diberikan kepada satu kendaraan saja. Selebihnya, kendaraan kedua jika menginap di parkir dikenakan tarif progresif.

“Hanya berlaku untuk satu kendaraan saja. Terserah keluarga pasien yang mau didaftarkan tarif khusus. itu yang mana? apakah motor atau mobil. Tidak boleh mendaftarkan dua kendaraan. Hanya dibatasi satu saja,” tutupnya memberi penekanan. *(luk)*

Ditag [Bisnis](#) [RSUD RT Notopuro](#) [Tarif Parkir Progresif](#)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Parkir Dianggap Lahan Bisnis, JCW Wadul DPRD Sidoarjo Protes Tarif Progresif RSUD RT Notopuro Bebani Pengunjung

 Republikjatim.Com
Selasa, 28 Apr 2026 13:45 WIB



Sidoarjo (republikjatim.com) - Kebijakan tarif parkir progresif di RSUD RT Notopuro Sidoarjo menuai gelombang protes keras. Hal ini, karena tarif progresif itu, dinilai membebani masyarakat yang tengah tertimpa musibah. Terutama bagi keluarga pasien yang menjalani perawatan di RSUD milik Pemkab Sidoarjo itu.

Karena itu, Ketua Umum Java Corruption Watch (JCW), Sigit Imam Basuki secara resmi melayangkan laporan ke Kantor DPRD Kabupaten Sidoarjo, Jumat (24/04/2026) kemarin. Langkah tegas ini, diambil menyusul banyaknya keluhan dari keluarga pasien yang merasa "tercekik" dengan skema tarif yang diterapkan di lingkungan rumah sakit milik Pemkab Sidoarjo itu.



Rabu, 29 Apr 2026 23:11 WIB

232 Desa Masuk Portal Pemetaan, Forkopimda Sidoarjo Sinergi Percepatan Pembangunan Gerai KDKMP

Berdasarkan data yang dihimpun di lapangan menyebutkan, sistem parkir di RSUD RT Notopuro Sidoarjo menerapkan kenaikan tarif hingga 100 persen setiap durasi 4 jam. Rincian tarif yang saat ini berlaku adalah:

*Sepeda Motor: Rp 3.000 / 4 jam

*Mobil: Rp 5.000 / 4 jam

*Bus/Box/Truck: Rp 6.000 / 4 jam

Sigit Imam Basuki mengatakan nilai nominal itu sangat tidak manusiawi. Alasannya, mengingat RSUD Sidoarjo adalah fasilitas pelayanan publik, bukan ruang untuk mencari keuntungan komersial (lahan bisnis).

ataa...
...
keuntungan komersial (lahan bisnis).

"Kenaikan tarif sebesar 100 persen setiap 4 jam ini sangat meresahkan. Rumah sakit itu melayani masyarakat yang lagi susah. Parkir kok dijadikan bisnis! Jangan mencari keuntungan besar di atas penderitaan (keluarga pasien) masyarakat Sidoarjo," ujar Sigit Imam Basuki, Selasa (28/04/2026).



Rabu, 29 Apr 2026 22:44 WIB

Sarankan BPD dan ABPEDNAS Dilebur Jadi Satu, Bupati Sidoarjo Dukung Program Jaga Desa

Menurut Sigit, penerapan tarif progresif ini menjadi preseden buruk bagi citra pelayanan kesehatan di wilayah Sidoarjo. Ia menilai adanya indikasi pengelola parkir lebih mengedepankan profit (keuntungan) dibandingkan fungsi sosial rumah sakit dalam membantu warga yang sedang menjenguk atau menunggu kerabat yang dirawat di rumah sakit itu.

"Kami (JCW) mendesak pimpinan dan anggota DPRD Sidoarjo untuk tidak tinggal diam melihat keluhan masyarakat Sidoarjo ini," pinta Sigit yang dikenal aktif mengkritisi kinerja Pemkab Sidoarjo ini.



Dalam surat yang dilayangkan ke DPRD Sidoarjo, lanjut Sigit terdapat beberapa poin tuntutan yang diajukan. Diantaranya Inspeksi Mendadak (Sidak). Yakni meminta pimpinan dan anggota dewan (DPRD Sidoarjo) segera turun ke lapangan untuk mengecek fakta di lapangan dan mendengarkan langsung keluhan warga di lokasi.



Rabu, 29 Apr 2026 19:21 WIB

Tarif Parkir RSUD Notopuro Sidoarjo Naik Tiap 4 Jam Diprotes, Dewan Warning Jangan Komersialkan Layanan Publik

Selain itu harus ada evaluasi regulasi. Yakni melakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah (Perda) Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2025. Jika regulasi itu terbukti merugikan masyarakat, JCW mendesak agar segera direvisi.

Kejadian harus ada transparansi pengelolaan. Yakni memastikan pengelola parkir tidak melakukan praktik bisnis yang membebani masyarakat di ruang fasilitas publik.

"Kami meminta DPRD Sidoarjo segera menindaklanjuti laporan kami. Jangan sampai regulasi yang ada justru menjadi alat untuk membebani warga yang sudah susah karena sedang berurusan dengan kesehatan," tandas Sigit.

Sementara hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak manajemen RSUD RT Notopuro maupun pihak terkait mengenai kebijakan tarif parkir yang sedang menjadi sorotan publik ini. Begitu pula dari pihak ketiga sebagai pemenang tender pengelolaan Parkir RSUD RT Notopuro Sidoarjo. Hel/Waw

Editor : Redaksi



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Cari Berita



HOME METROPOLIS POLITIK EKDIS HUKRIM PERISTIWA ADVERTORIAL PROFILE KULINER GAYA HIDUP PEMERINTAHAN PENDIDIKAN

ntuk Kebaikan Kota Delta ■ Skandal Tanah di Sukorejo, Kejanggalan Pernyataan Terlapor hingga Dugaan Keterlibatan Perangkat Desa ■ Bupati Sidoarjo

Proyek Strategis Pembangunan Frontage Road Mati Suri, Tahun 2025 Hanya Bisa Tuntaskan 10 Meter

Republikjatim.Com
Selasa, 28 Apr 2026 13:04 WIB



Sidoarjo (republikjatim.com) - Ambisi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo dalam mengurai benang kusut kemacetan melalui mega proyek Frontage Road (FR), kini tengah berada di titik nadir. Bukannya tancap gas, proyek strategis yang digawangi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBM dan SDA) Pemkab Sidoarjo ini, justru terlihat "mati suri" sepanjang Tahun 2025.

Berdasarkan data yang tertuang dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sidoarjo, capaian pembangunan Tahun 2025 menjadi rapor merah paling buruk dalam lima tahun terakhir. Dari target sepanjang 700 meter yang dicanangkan, dinas terkait hanya mampu menyelesaikan 10 meter saja. Angka yang tergolong ironis dan jauh dari ekspektasi publik di Kota Delta.



Rabu, 29 Apr 2026 23:11 WIB

232 Desa Masuk Portal Pemetaan, Forkopimda Sidoarjo Sinergi Percepatan Pembangunan Gerai KDKMP

Jika menilik rekam jejak pembangunan sejak Tahun 2021, Frontage Road sejatinya sempat menunjukkan geliat positif. Puncaknya, terjadi pada Tahun 2022, di mana pembangunan mampu menyentuh angka 3.003,9 meter. Namun, setelah sempat fluktuatif di Tahun 2023 (1.093 meter) dan di Tahun 2024 (2.391 meter). Sedangkan capaian di Tahun 2025 justru anjlok drastis hingga menyentuh angka hampir nol.

Rekam Jejak Pembangunan Frontage Road (2021-2025):

Tahun	Capaian (Meter)
2021	1.290
2022	3.003,9
2023	1.093



2023	1.093
2024	2.391
2025	10
Total	7.778,9

Melihat kondisi yang memprihatinkan itu, Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo, Choirul Hidayat langsung melayangkan kritik tajam. Menurutnya, kegagalan realisasi target ini adalah sinyal ada mekanisme kerja yang macet di tubuh Dinas PUBM dan SDA Pemkab Sidoarjo.

"Kalau melihat tren sebelumnya, capaian bisa ribuan meter per tahun. Tapi di 2025 hanya 10 meter. Ini jelas ada yang tidak berjalan sebagaimana mestinya dalam kinerjanya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menanganinya," ujar politisi senior PDI Perjuangan yang akrab disapa Abah Dayat dengan nada geram, Selasa (28/04/2026).



Rabu, 29 Apr 2026 22:44 WIB

Sarankan BPD dan ABPEDNAS Dilebur Jadi Satu, Bupati Sidoarjo Dukung Program Jaga Desa

Lebih jauh, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sidoarjo ini menuntut transparansi penuh dari dinas terkait. Ia mendesak agar kendala di balik mandeknya proyek (FR) ini bisa segera dibedah. Apakah persoalan klasik pembebasan lahan, perencanaan yang tidak matang atau justru karena hambatan teknis lainnya.

"Harus dibuka apa saja masalahnya. Jangan sampai target hanya jadi angka di atas kertas saja. Sementara masyarakat terus dirugikan kemacetan yang kian menjadi-jadi di wilayah Buduran, Gedangan hingga Waru," ungkapny.



Rabu, 29 Apr 2026 19:21 WIB

Tarif Parkir RSUD Notopuro Sidoarjo Naik Tiap 4 Jam Diprotes, Dewan Warning Jangan Komersialkan Layanan Publik

Frontage road sejatinya diproyeksikan sebagai nadi baru lalu lintas Sidoarjo yang kini semakin padat. Ketidaksiaran Pemkab Sidoarjo dalam penyelesaian proyek ini,





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Cari Berita



HOME METROPOLIS POLITIK EKBIS HUKRIM PERISTIWA ADVERTORIAL PROFILE KULINER GAYA HIDUP PEMERINTAHAN PENDIDIKAN

rsen Anak Buruh di Kota Delta Masuk Sekolah Negeri ■ Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tolak Pembelaan Sugiri, Sidang Korupsi Proyek di RSUD Ponorogo Buduran, Gedangan hingga Waru," ungkapnya.



Rabu, 29 Apr 2026 19:21 WIB

Tarif Parkir RSUD Notopuro Sidoarjo Naik Tiap 4 Jam Diprotes, Dewan Warning Jangan Komersialkan Layanan Publik

Frontage road sejatinya diproyeksikan sebagai nadi baru lalu lintas Sidoarjo yang kini semakin padat. Ketidaksiaran Pemkab Sidoarjo dalam penyelesaian proyek ini, dikhawatirkan akan memicu kemacetan permanen yang merugikan warga.

"Kami (Komisi C DPRD Sidoarjo) bakal terus mengawal ketat kinerja OPD terkait agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Harapannya, perencanaan ke depan tidak hanya mengejar target tinggi di atas kertas saja. Akan tetapi harus realistis, terukur dan benar-benar berdampak bagi masyarakat Sidoarjo," tegasnya.

Kini, bola panas ada di tangan Dinas PUBM dan SDA Pemkab Sidoarjo. Publik menanti langkah konkret dari pemerintah daerah, apakah ini akhir dari mimpi kemudahan akses jalan atau justru hanya batu sandungan yang akan segera dibenahi proses dan langkahnya.

Ary/Waw

Editor : Redaksi

